

Peran Kebijakan Pemerintah dalam Ekspor dan Impor pada Sektor Agrikultur dan Manufaktur di Indonesia

Viyolanda Azrimultiya, S. E., M.E.

Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta
Jl. RS. Fatmawati No.1, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

E-mail: viyolanda@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sektor agrikultur dan manufaktur yang memberikan kontribusi terbesar pada PDB Indonesia. Pertumbuhan Ekonomi juga ditopang oleh kegiatan ekspor dan impor dimana volume ekspor dan impor sektor agrikultur dan manufaktur meningkat setiap tahunnya pada tahun 2020 sampai 2023. Namun mengalami penurunan pada tahun 2024 dari sisi ekspor, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 mulai terjadi moderasi ekspor seiring turunnya harga batu bara dan CPO, sehingga mengalami penurunan pada tahun 2024. Sementara itu dari sisi impor secara keseluruhan konsisten tumbuh sejak pemulihan pasca pandemi. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi literatur untuk menganalisis Peran Pemerintah dalam Penerapan Kebijakan Ekspor dan Impor pada Sektor Agrikultur dan Manufaktur di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah telah berperan dalam menjaga kegiatan ekspor dan impor dengan cara menetapkan kebijakan kuota impor, tarif bea masuk, hilirisasi produk, menambahkan standar persyaratan produk. Serta, pemerintah juga berupaya menjawab tantangan yang akan dihadapi kedepannya dengan menggunakan strategi-strategi yang dapat meningkatkan nilai ekspor dan tidak merugikan produsen dengan adanya impor. Pendapatan negara dapat meningkat karena pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan perencanaan dan neraca perdagangan yang seimbang.

Kata kunci: *Ekspor, Impor, Pertumbuhan Ekonomi, Agrikultur, dan Manufaktur*

ABSTRACT

Indonesia's economic growth is in line with the economic growth of the agricultural and manufacturing sectors, which contribute the largest to Indonesia's GDP. Economic growth is also supported by export and import activities. The volume of exports and imports from the agricultural and manufacturing sectors increased annually from 2020 to 2023. However, the export volume decreased in 2024 due to a moderation in exports along with the decline in coal and CPO prices in 2023. Meanwhile, from the import side, it has consistently grown since the post-pandemic recovery. The research method applied in this study is a literature study approach to analyze the Role of Government in Implementing Export and Import Policies in the Agricultural and Manufacturing Sectors in Indonesia. The study results show that the government has played a role in maintaining export and import activities by setting import quota policies, import duty rates, product downstream, and adding product requirement standards. The government is also trying to answer the challenges that will be faced in the future by using strategies that can increase export value and not harm producers with imports. Therefore, the national income can be increased by economic growth that grow as planned and the stability of trade balance.

Keyword: *Export, Import, Economic Growth, Agriculture, and Manufacture*

1. PENDAHULUAN

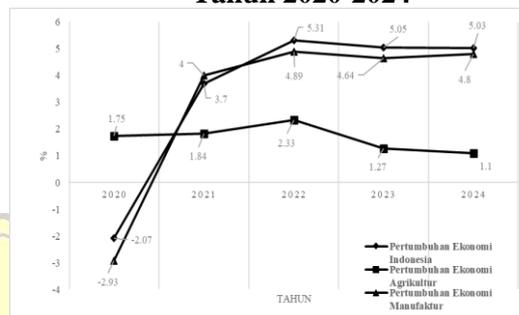
Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami pemulihan pada tahun 2023, dimana pertumbuhan ekonomi dunia yang masih menurun dan ketidakpastian pasar keuangan yang tinggi. Permintaan domestik yang kuat dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi. Stabilitas perekonomian tetap terjaga, baik internal maupun eksternal. Begitu juga dengan stabilitas nilai tukar yang terjaga didukung kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia di tengah kuatnya dolar AS. Inflasi turun dan terkendali berada dalam kisaran sasaran. Pertumbuhan ekonomi negara merupakan pilar penting pembangunan di segala bidang. Jika negara tumbuh dengan baik, begitu juga daerah non-ekonomi lainnya. Karena pertumbuhan ekonomi negara terkait erat dengan kesejahteraan rakyatnya, hal itu dapat dilihat sebagai ukuran kesehatan ekonomi negara yang baik dan sebaliknya (Bank Indonesia, 2023).

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang, dan pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena penting yang dialami dunia belakangan ini. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat (Randy dan Sitti, 2023).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -2,07 persen. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai

pergerakan yang kurang stabil. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19.

Gambar 1.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Data Diolah 2025

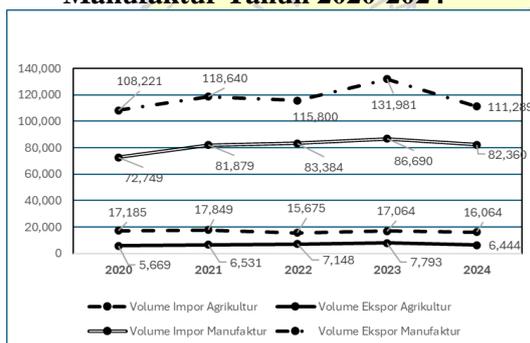
Tahun 2021 perekonomian Indonesia mulai pulih menjadi 3,7% karena dibantu oleh dukungan pemerintah dan konsumsi domestik. Perekonomian Indonesia kembali mengalami pemulihan pada tahun 2022 mencapai 5,31% yang dipacu oleh nilai ekspor komoditas yang tinggi. Namun pada tahun 2023 kembali melambat menjadi 5,05% karena adanya normalisasi ekspor dan tekanan global. Hal ini masih berlanjut sampai tahun 2024, pertumbuhan ekonomi hampir menyamai target pemerintah, yaitu 5,03% yang didukung oleh belanja publik dan konsumsi domestik.

Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada 2024 di tengah dinamika tingginya ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 tetap baik ditopang oleh permintaan domestik serta stabilitas harga tetap terjaga didukung oleh konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia dan koordinasi erat dengan kebijakan pemerintah. Neraca pembayaran Indonesia juga tetap sehat sejalan dengan rendahnya defisit transaksi berjalan serta meningkatnya surplus neraca transaksi modal dan finansial sehingga mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah (Bank Indonesia, 2024).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sektor agrikultur dan manufaktur yang

memberikan kontribusi terbesar pada PDB Indonesia. Pertumbuhan Ekonomi juga ditopang oleh kegiatan ekspor dan impor, dimana volume ekspor dan impor sektor agrikultur dan manufaktur meningkat setiap tahunnya pada tahun 2020 sampai 2023. Namun mengalami penurunan pada tahun 2024 dari sisi ekspor, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 mulai terjadi moderasi ekspor seiring turunnya harga batu bara dan CPO, sehingga mengalami penurunan pada tahun 2024. Sementara itu dari sisi impor secara keseluruhan konsisten tumbuh sejak pemulihan pasca pandemi.

Gambar 2.
Volume Ekspor dan Impor Non Migas menurut Komoditas Agrikultur dan Manufaktur Tahun 2020-2024



Sumber: BI, Data Diolah 2025

Perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia tidak terlepas dari adanya hambatan yang terjadi baik dari internal maupun eksternal. Dari sisi internal pada tahun 2020 adanya gangguan logistik karena pandemi COVID-19, ekspor-impor menurun tajam pada awal tahun. Pada tahun 2021 pemulihan ekspor menguat, tetapi logistik masih terganggu, serta ketergantungan komoditas tinggi.

Pada tahun 2022 terjadi larangan ekspor CPO menurunkan nilai ekspor kelapa sawit, meskipun harga sedang tinggi. Penurunan harga batu bara dan logam memperlihatkan dampak minimnya diversifikasi ekspor yang terjadi pada tahun 2023. Sementara itu, pada tahun 2024 masih adanya kendala biaya logistik, larangan ekspor timah, dan

belum optimalnya hilirisasi sektor-sektor tertentu.

Dari sisi eksternal hambatan perdagangan yang dominan terjadi pada tahun 2020-2024 meliputi gangguan global akibat COVID-19 adanya volatilitas harga komoditas, seperti: CPO, batu bara, dan bijih logam. Masih berlangsungnya ketegangan geopolitik, seperti yang terjadi antara AS dan China yang menyebabkan fragmentasi rantai pasok dan perang Rusia dan Ukraina yang memicu krisis pangan dan energi global. Kemudian beberapa negara menetapkan kebijakan proteksionis (penerapan tarif dan kuota) dan standar ESG terhadap barang-barang ekspor dan impor.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan pemerintah dalam ekspor dan impor pada sektor agrikultur dan manufaktur. Fokus kajian meliputi identifikasi kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah, serta strategi efektif untuk mengatasi masalah ekspor dan impor di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi, pembuat kebijakan dan pelaku ekspor impor yang tertarik untuk meneliti ekspor impor di Indonesia.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan pertukaran barang, jasa, dan faktor produksi yang melintasi batas negara. Berdasarkan Markusen, Melvin, Kaempfer, & Maskus (1995) terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perdagangan internasional, diantaranya adalah adanya perbedaan teknologi, perbedaan sumber daya yang dimiliki, adanya kebijakan pemerintah, persaingan tidak sempurna di pasar domestik dan *economies of scale*, dan perbedaan pada sisi permintaan, seperti selera dan pendapatan perkapita.

Perbedaan teknologi antar negara dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional. Ketika dua negara memiliki perbedaan teknologi dalam memproduksi, maka perbedaan tersebut dapat dieksploitasi untuk menciptakan perdagangan. Masing-masing negara tersebut akan melakukan spesialisasi dalam memproduksi produk yang memiliki keunggulan teknologi produksi dan mengekspor produk tersebut untuk kemudian ditukar dengan produk yang tidak memiliki keunggulan teknologi dalam produksi. Perbedaan teknologi ini akan menciptakan perbedaan kemampuan memproduksi yang selanjutnya menciptakan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif inilah yang akan menyebabkan perbedaan harga, sehingga memungkinkan setiap negara memiliki keuntungan dengan melakukan perdagangan.

Selain itu, perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu negara juga dapat mendorong terjadinya perdagangan, hal tersebut dapat dijelaskan oleh model Heckscher-Ohlin. Dalam model tersebut dijelaskan bahwa keunggulan komparatif dan perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara akan ditentukan oleh perbedaan kelimpahan faktor (*factor endowments* atau *factor abundance*) relatif antar negara. Jika diasumsikan bahwa setiap negara memiliki kelimpahan faktor yang relatif berbeda dibandingkan negara lain, faktor produksi baik modal maupun tenaga kerja yang dimiliki dapat dipindahkan dengan mudah (*perfect capital mobility*), memiliki teknologi produksi yang sama, fungsi produksi bersifat *constant return to scale*, tidak terdapat biaya transportasi, tarif, atau hambatan lainnya terhadap aliran perdagangan internasional yang bebas, maka suatu negara akan mengekspor komoditi yang dalam

proses produksinya membutuhkan penggunaan intensif dari faktor produksi yang relatif berlimpah dan murah di negara tersebut dan mengimpor komoditi yang membutuhkan penggunaan intensif dari faktor produksi yang relatif langka dan mahal.

Jika pada model Heckscher-Ohlin diasumsikan bahwa faktor produksi bersifat *perfect mobility*, maka pada model faktor spesifik (*specific factors model*) hanya tenaga kerja saja yang diasumsikan demikian. Sementara modal, seperti modal fisik, bersifat tetap pada tiap industri di suatu negara dalam jangka pendek. Dalam model ini dikatakan bahwa setiap negara akan melakukan ekspor suatu produk yang memiliki kelimpahan modal jika diasumsikan kedua negara memiliki ketersediaan tenaga kerja yang sama yang bersifat *mobile*. Sementara itu, jika kelimpahan faktor tenaga kerja yang dimiliki oleh kedua negara berbeda, maka perdagangan akan bergantung pada fungsi produksi dan alokasi dari modal.

Berbeda halnya dengan teori Heckscher-Ohlin dan model faktor spesifik, kebijakan yang dilakukan pemerintah juga dapat mendorong adanya perdagangan antar negara jika dalam suatu perdagangan terdapat hambatan perdagangan walaupun seringkali kebijakan tersebut tidak ditujukan untuk mendorong perdagangan. Kebijakan pajak dan subsidi yang dilakukan pemerintah dapat mendorong adanya perdagangan internasional. Kebijakan pajak konsumsi dapat menyebabkan berkurangnya konsumsi domestik yang kemudian menyebabkan bertambahnya ekspor ataupun berkurangnya impor. Sementara pajak produksi dapat menyebabkan berkurangnya produksi yang kemudian diikuti oleh berkurangnya ekspor atau bertambahnya impor. Kebijakan yang

dilakukan oleh pemerintah tersebut dapat menyebabkan distorsi pada kesejahteraan masyarakat, dimana kebijakan pajak dapat menyebabkan berkurangnya kesejahteraan masyarakat, sehingga terjadilah perdagangan sebagai implikasinya.

Sementara itu, mengenai persaingan tidak sempurna, Markusen, Melvin, Kaempfer, & Maskus (1995) menjelaskan bahwa dampak dari adanya persaingan tidak sempurna disuatu negara, seperti monopoli, dapat tereliminasi dengan adanya perdagangan internasional, atau dengan kata lain sebuah negara akan menikmati keuntungan dari perdagangan (*gain from trade*). Jika dalam suatu negara terdapat produsen yang memiliki kekuatan monopoli, maka ia akan cenderung memproduksi output lebih rendah dari tingkat yang seharusnya terjadi di pasar persaingan, dengan tingkat harga yang lebih tinggi. Namun, jika dilakukan perdagangan internasional, maka produsen yang bertindak monopoli di pasar domestik tersebut akan menghadapi tingkat harga dunia dan menyebabkan kekuatan pasar yang dimilikinya berkurang, sehingga ia akan memproduksi lebih banyak dan menetapkan harga lebih rendah.

Jika suatu negara memiliki *economies of scale*, maka perdagangan dapat tetap terjadi antara kedua negara yang memiliki perekonomian yang sama atau bahkan antara dua negara yang tidak saling memiliki keunggulan komparatif. Sebuah negara akan melakukan spesialisasi ketika terjadi pengembalian yang semakin meningkat dalam berproduksi (*increasing return to scale*) walaupun efek kesejahteraan yang dihasilkan dalam perdagangan tersebut tergantung dari jenis barang yang dispesialisasikan. Biaya produksi yang semakin rendah dan keberagaman produk adalah salah satu implikasi dari

terciptanya *economies of scale*. Hal tersebutlah yang menyebabkan sebuah negara memiliki keunggulan tersendiri yang pada akhirnya mendorong adanya perdagangan.

Selain dari sisi penawaran seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perdagangan internasional juga dapat terjadi dari sisi permintaan. Permintaan dapat mendorong perdagangan internasional disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah karena adanya perbedaan selera dan perbedaan tingkat pendapatan per kapita negara tersebut. Suatu negara akan cenderung melakukan impor pada produk yang memiliki preferensi tertinggi. Sementara itu, keterkaitan antara perbedaan permintaan dengan pendapatan per kapita dapat dijelaskan oleh hipotesis Linder³. Dalam hipotesis tersebut disebutkan bahwa selain pendapatan per kapita, perdagangan juga dipengaruhi oleh peran wirausaha dalam menghasilkan produk baru. Suatu negara hanya akan mengekspor produk yang dapat diproduksi oleh wirausaha, setelah kebutuhan pasar domestik akan produk tersebut sudah terpenuhi.

Hubungan suatu negara dengan dunia internasional, dalam hal ini perdagangan internasional, akan mempengaruhi kinerja negara tersebut terutama kinerja pada jangka panjang (Grossman and Helpman, 1997, hal.237). Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yakni pertama, perdagangan internasional dapat membuka saluran komunikasi yang akan memfasilitasi penyebaran informasi teknis lainnya. Kedua, persaingan internasional akan mendorong wirausaha di masing-masing negara untuk terus melakukan inovasi, baik dalam hal ide maupun teknologi. Ketiga, integrasi internasional dapat memperluas pasar dimana perusahaan tersebut

beroperasi. Keempat, perdagangan internasional dapat mendorong suatu negara melakukan spesialisasi produksi yang akan memengaruhi pertumbuhan output suatu negara.

2.2 Hambatan Perdagangan

Seringkali terdapat banyak hambatan dalam melakukan perdagangan internasional. Hambatan itu ada yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kebijakan perdagangan luar negeri memiliki dua tujuan utama, yakni meningkatkan ekspor dan mengurangi ketergantungan pada impor. Untuk meningkatkan ekspor, kebijakan perdagangan luar negeri mempunyai sejumlah instrumen, diantaranya pemberian subsidi ekspor bagi eksportir yang sudah memiliki sertifikat ekspor, pemberian fasilitas kredit perbankan dengan suku bunga murah, dan pembebasan.

Sedangkan kebijakan perdagangan luar negeri yang bertujuan mengurangi impor juga memiliki sejumlah instrument diantaranya adalah pengenaan bea masuk terhadap impor dengan tarif, hal ini lazim disebut proteksi. Menurut D.Salvatore (1997: 270) hambatan perdagangan internasional terdiri dari hambatan tarif dan nontarif. Penjelasan sebagai berikut:

a. Hambatan Tarif

Tarif merupakan salah satu instrumen kebijakan perdagangan luar negeri yang membatasi arus perdagangan internasional, tarif adalah suatu pembebanan atas barang yang melintasi daerah pabean (daerah geografis). Tarif adalah pajak atau cukai yang dikenakan untuk suatu komoditi yang diperdagangkan lintas batas teritorial.

Tarif ini merupakan kebijakan yang paling tua dan secara tradisional telah digunakan sebagai sumber penerimaan pemerintah. Pengenaan

tarif dimaksudkan untuk memproteksi produk dalam negeri. Dengan adanya tarif harga barang impor dalam mata uang nasional meningkat sehingga permintaan di pasar dalam negeri menurun dan hal tersebut mendorong produksi dalam negeri karena adanya kenaikan permintaan domestik atas barang hasil dalam negeri.

Ada tiga macam jenis tarif yang biasa digunakan dalam perdagangan internasional yaitu: (1) Bea Ekspor (export duties) adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diangkut atau diekspor menuju negara lain; (2) Bea Transito (transit duties) adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain; (3) Bea Impor (import duties) adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk kedalam suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir.

b. Hambatan Non Tarif

Instrumen kebijakan perdagangan internasional selain tarif adalah berupa kebijakan non tarif, yang terdiri dari:

1. **Kuota**, merupakan pembatasan secara kuantitatif tidak hanya terhadap impor, tetapi juga diterapkan oleh banyak negara terhadap ekspor, karena tujuan utama pengenaan kuota adalah untuk kepentingan konsumen di dalam negeri, yakni menjaga ketersediaan stok domestik;

2. **Embargo**, pelarangan impor dan ekspor jenis produk tertentu atau pelarangan secara total dalam perdagangan dengan negara tertentu sebagai suatu tambahan dalam kebijakan politik yang dilakukan pemerintah;

3. **Kartel – kartel Internasional**, merupakan organisasi produsen komoditi tertentu dari berbagai negara yang sepakat untuk membatasi outputnya dan juga mengendalikan ekspor komoditi tersebut

dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan;

4. **Dumping**, kebijakan ekspor dari suatu komoditi dengan harga jauh dibawah pasaran atau penjualan komoditi di luar negeri dengan harga yang jauh lebih murah dibanding dengan harga penjualan domestik;

5. **Subsidi Ekspor**, pembayaran langsung atau pemberian keringanan pajak dan bantuan subsidi kepada para eksportir atau calon eksportir nasional, atau pemberian pinjaman kepada pengimpor asing dengan bunga rendah dalam rangka memacu ekspor suatu negara.

2.3. Nilai Tukar

Nilai tukar didefinisikan sebagai harga relatif dari suatu nilai mata uang terhadap nilai mata uang lainnya. Nilai tukar merupakan faktor penting bagi suatu negara untuk melakukan transaksi dengan negara lain. Keadaan perekonomian suatu negara dapat diukur melalui nilai tukar. Sistem nilai tukar merupakan suatu sistem kebijakan yang dapat menentukan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain (Ahmad, 2014). Nilai tukar dapat ditentukan oleh suku bunga, tingkat investasi dan variabel makro ekonomi lainnya yang berada di bawah kebijakan fiskal dan moneter (Ito dan Sato, 2006).

Terdapat dua aspek dalam nilai tukar, yaitu aspek nominal dan aspek riil. Nilai tukar nominal merupakan harga relatif mata uang dua negara (Mankiw, 2006). Pada prakteknya, nilai tukar nominal akan menerangkan berapa banyak suatu mata uang domestik harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Jika jumlah mata uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan mata uang lainnya mengalami peningkatan, maka dapat dikatakan nilai tukar mengalami depresiasi. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah mata uang yang dibayarkan menjadi lebih sedikit untuk mendapatkan

mata uang lainnya, maka dapat dikatakan nilai tukar mengalami apresiasi.

2.4. Suku Bunga

BI Rate merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia pada setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Dimana sasaran operasional kebijakan moneter dapat dilihat pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan yang terjadi pada suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan suku bunga deposito dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.

Dengan melakukan pertimbangan pada faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi kedepannya diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya BI Rate akan diturunkan oleh Bank Indonesia apabila inflasi kedepannya diperkirakan berada di bawah target yang telah ditetapkan. Untuk penguatan kerangka operasi moneter Bank Indonesia memperkenalkan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu *BI 7-Day Repo Rate* yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Selain BI Rate yang digunakan pada saat ini, pengenalan suku bunga kebijakan yang baru tidak mengubah *stance* kebijakan moneter yang sedang diterapkan.

Tujuan BI memperkenalkan suku bunga acuan BI baru adalah agar suku bunga kebijakan dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen *BI 7-Day Repo Rate*

sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, bersifat transaksional atau diperdagangkan di pasar dan mendorong pendalaman pasar keuangan. Pada masa transisi, BI Rate akan tetap digunakan sebagai acuan bersama dengan *BI 7-Day Repo Rate*.

Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai bank sentral dan merupakan *best practice* internasional dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Khususnya untuk menjaga stabilitas harga. Penguatan kerangka operasi moneter juga mempertimbangkan kondisi makroekonomi yang kondusif dalam beberapa waktu terakhir, yang memberikan momentum bagi upaya penguatan kerangka operasi moneter.

Penetapan respons (*stance*) kebijakan moneter dilakukan setiap bulan melalui mekanisme RDG Bulanan dengan cakupan materi bulanan, dimana respon kebijakan moneter (BI Rate) ditetapkan berlaku sampai dengan RDG berikutnya. Penetapan respon kebijakan moneter (BI Rate) dilakukan dengan memperhatikan efek tunda kebijakan moneter (*lag of monetary policy*) dalam mempengaruhi inflasi. Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan BI Rate (secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 *basis poin* (bps). Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi Bank Indonesia yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, maka perubahan BI Rate dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam kelipatan 25 bps.

3. METODOLOGI

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi literatur untuk menganalisis Peran Pemerintah dalam Penerapan Kebijakan Ekspor dan Impor pada Sektor Agrikultur

dan Manufaktur di Indonesia. Studi literatur merupakan pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini karena berfokus pada analisis sekunder dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, serta publikasi dari lembaga-lembaga terkait yang akan dibahas.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana peran pemerintah dalam penerapan kebijakan ekspor dan impor khususnya pada sektor agrikultur dan manufaktur, dimana kedua sektor tersebut merupakan penyumbang PDB terbesar bagi Indonesia. Untuk itu, setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah akan berdampak terhadap pendapatan negara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengertian Ekspor dan Impor

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sementara itu, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dari luar negeri ke dalam negeri (Indonesia). Dalam kegiatan ekspor impor pemerintah memiliki peranan yang penting dalam menetapkan kebijakan. Pemerintah menetapkan bea masuk yang merupakan pungutan negara berdasarkan UU yang dikenakan terhadap barang impor dan bea keluar untuk pungutan negara berdasarkan UU yang dikenakan terhadap barang ekspor. Terdapat juga tarif yang merupakan klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar (UU RI No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan).

Tujuan dilakukannya ekspor, yaitu: (1) meningkatkan pendapatan nasional (devisa), (2) memperluas pasar produk domestik, (3) mendorong pertumbuhan ekonomi, (4) menyerap tenaga kerja, (4) memperkenalkan produk lokal ke pasar internasional. Sedangkan tujuan dari

impor ialah: (1) memenuhi kebutuhan domestik yang tidak diproduksi di dalam negeri, (2) mendapatkan barang modal dan teknologi, (3) menjaga stabilitas harga, (4) mendukung produksi industri (bahan baku).

Berdasarkan tujuan tersebut dapat dilihat kegiatan ekspor dan impor memiliki peran penting terhadap perekonomian Indonesia, sehingga perlunya kebijakan-kebijakan yang dapat menguntungkan para pelaku ekspor dan impor. Ekspor yang meningkat dapat menambah pemasukan negara dan perekonomian dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, impor juga dibutuhkan agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

4.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan *Gross Domestic Product (GDP)* atau *Gross National Product (GNP)* tanpa meninjau apakah peningkatan tersebut lebih besar atau kecil dari tingkat Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara (Todaro, 2005). Menurut teori dasar pertumbuhan ekonomi Neoklasik dari Solow dan Swan (1956) tidak terdapat pengaruh peran pemerintah terhadap pertumbuhan baik dalam bentuk pengeluaran maupun pajak (Kneller *et al.*, 1999). Pertumbuhan ekonomi hanya dipengaruhi oleh stok kapital, tenaga kerja dan teknologi yang bersifat eksogen. Dalam ilmu ekonomi, Produk Domestik Bruto didefinisikan sebagai nilai dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah geografis ekonomi pada interval tertentu” (misalnya satu tahun)”. Rumus PDB dinyatakan sebagai nilai pasar total dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara pada tahun tertentu, sama dengan total konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah,

ditambah ekspor dikurangi impor (Hamed & Ume, 2011).

4.3. Sektor Agrikultur dan Manufaktur

Dalam perhitungan PDB Indonesia terdapat 17 sektor yang diperhitungkan, dimana terdapat dua sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB, yaitu agrikultur dan manufaktur. Sektor agrikultur (pertanian) adalah sektor ekonomi yang mencakup kegiatan budidaya tanaman, peternakan, perikanan, dan kehutanan dengan tujuan menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan produk lainnya. Sedangkan sektor manufaktur adalah bagian dari sektor industri yang melakukan proses pengolahan bahan baku atau bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang bernilai tambah lebih tinggi, melalui penggunaan tenaga kerja, mesin, dan teknologi.

Sektor agrikultur terdiri dari beberapa sub sektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sementara itu, sektor manufaktur terdiri dari beberapa sub sektor, yaitu: industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri logam dasar, industri kimia dan farmasi, industri otomotif, dan industri elektronik. Sektor agrikultur memberikan kontribusi sebesar 12% terhadap PDB Indonesia, sub sektor yang terbesar memberikan kontribusi adalah perkebunan dan tanaman pangan (BPS, 2023). Di sisi lain, sektor manufaktur memberikan kontribusi sebesar 20% terhadap PDB Indonesia dengan sub sektor penyumbang terbesar adalah makanan dan minuman.

Terdapat beberapa komoditas yang ada di sektor agrikultur seperti: beras, gula, jagung, bawang putih, kedelai, bahan baku industri, garam, gandum, dan kapas. Sementara itu, beberapa komoditi manufaktur, yaitu: besi/ baja, CPO, kain, pakaian jadi, kain tenun, sepeda. Beberapa komoditi ini akan menunjukkan

bagaimana pemerintah menetapkan kebijakan dalam melakukan kegiatan ekspor impor.

Oleh karena itu pemerintah sangat memperhatikan kedua sektor tersebut dalam pembuatan kebijakan agar tidak merugikan pelaku-pelaku ekonomi yang ada di dalamnya. Melihat peran kedua sektor tersebut terhadap perekonomian sangat besar, yaitu sebagai pembuka lapangan usaha, penyumbang PDB nasional, sumber bahan baku industri, sumber devisa negara, penopang ketahanan pangan, pendorong ekspor non-migas, pemicu pertumbuhan daerah industri, dan motor industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Sehingga pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi untuk menjaga kestabilan kedua sektor tersebut.

4.4. Kebijakan Pemerintah dalam Ekspor dan Impor di Sektor Agrikultur dan Manufaktur

Kebijakan kuota impor dan juga tarif bea masuk untuk impor beras yang diterapkan oleh pemerintah pada tahun 2021 melalui Kementerian Perdagangan dan BULOG sepakat untuk menetapkan kuota impor beras sebesar 1 juta ton, yang terdiri dari 500 ribu ton untuk beras medium dan 500 ribu ton untuk beras premium. Selain itu, dari segi tarif, pemerintah menurunkan tarif bea masuk untuk impor beras medium dan premium dari 10% menjadi 0%. Artinya, beras impor dapat masuk ke Indonesia tanpa dikenakan pajak, padahal seharusnya kebijakan tarif impor ini dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat proteksi bagi petani lokal. Akibatnya, kebijakan kuota dan penurunan tarif ini justru memberikan dampak yang buruk dan perlu dikritisi (Pamungkas, *et. al.*, 2021).

Beberapa faktor utama yang mendorong kebijakan impor antara lain adalah peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada naiknya permintaan

beras, belum optimalnya hasil pertanian nasional akibat perubahan iklim dan alih fungsi lahan serta ketidakpastian terhadap musim panen dan distribusi. Selain itu, kekhawatiran terhadap gejolak harga pangan global dan potensi inflasi juga mendorong pemerintah mengambil langkah cepat melalui impor, khususnya menjelang tahun politik atau saat menghadapi bencana seperti pandemi dan El Niño.

Kebijakan tarif bea masuk turut menjadi salah satu alat intervensi yang digunakan pemerintah dalam mengatur volume impor. Ketika tarif impor diturunkan atau dihapuskan, jumlah beras yang masuk cenderung meningkat karena hambatan biaya masuk menjadi lebih rendah. Sebaliknya, pemberlakuan tarif yang tinggi dapat menahan laju impor, meskipun di sisi lain berpotensi menyebabkan kenaikan harga di pasar domestik apabila pasokan dalam negeri tidak memadai (Kurniawan, *et. al.*, 2024).

Dari segi kebijakan, impor beras dilakukan sesuai aturan dalam undang-undang yang berlaku untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga di dalam negeri, terutama saat produksi domestik tidak mencukupi karena faktor produksi dan iklim. Impor beras juga bertujuan menciptakan surplus pasokan agar harga beras tetap stabil dan tidak menimbulkan gejolak yang merugikan petani lokal dan konsumen. Dengan demikian, ketergantungan terhadap impor dapat mengurangi insentif petani lokal untuk meningkatkan produktivitas mereka, yang pada akhirnya bisa mengancam keberlanjutan sektor pertanian Indonesia dalam jangka panjang (Rizki dan Pangesti, 2025).

Selain beras, kedelai juga merupakan komoditi terbesar yang di impor oleh Indonesia. Menurut Bayu (2024) kebijakan tarif impor kedelai memberikan dampak yang berbeda terhadap pelaku pasar domestik. Pembebasan tarif impor cenderung meningkatkan volume impor dan

menurunkan harga kedelai di pasar domestik yang menguntungkan konsumen namun, merugikan produsen kedelai lokal. Sebaliknya, penerapan tarif impor sebesar 5% hingga 10% mampu menekan volume impor dan meningkatkan kesejahteraan produsen dalam negeri, tetapi menyebabkan harga kedelai naik dan menurunkan konsumsi masyarakat.

Jagung juga merupakan komoditi impor yang penting bagi Indonesia, sehingga volumenya impornya juga cukup besar. Penghapusan tarif impor jagung oleh pemerintah Indonesia sesuai skema *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) yang mulai diberlakukan pada 2010 memberikan dampak beragam terhadap pasar jagung domestik. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan ketersediaan jagung di pasar domestik dengan harga lebih terjangkau bagi konsumen dan pelaku industri pakan ternak, mengingat jagung merupakan komoditas pangan penting. Harga jagung impor menjadi lebih murah sehingga konsumen dan industri pakan ternak mendapatkan keuntungan dari harga yang lebih rendah, sementara permintaan jagung di Indonesia meningkat baik untuk konsumsi langsung maupun industri pakan.

Namun demikian, dampak negatif dirasakan oleh petani jagung lokal yang harus bersaing dengan jagung impor lebih murah sehingga harga jual jagung domestik turun dan berpotensi menurunkan kesejahteraan petani akibat pendapatan yang menurun. Selain itu, penghapusan tarif impor dari negara ekstra ASEAN juga menurunkan insentif petani untuk memperluas lahan dan meningkatkan produksi sehingga produksi jagung domestik ikut menurun.

Mengingat Thailand merupakan salah satu eksportir utama jagung ke Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan lain yakni penurunan kuota impor jagung dari Thailand, dimana secara logis memang akan mengurangi volume impor jagung Indonesia dari

negara tersebut. Penurunan impor ini berdampak pada berkurangnya pasokan jagung di pasar domestik sehingga permintaan jagung dalam negeri baik untuk industri pakan maupun konsumsi langsung juga ikut menurun. Dampaknya, harga jagung di tingkat produsen cenderung meningkat karena pasokan yang lebih terbatas sementara permintaan tetap ada dan hal ini wajar terjadi dalam mekanisme pasar (Baharuddin, 2022).

Pada sektor manufaktur, misalnya komoditi besi/ baja, implementasi strategi hilirisasi di sektor industri baja dan besi sebagai respons terhadap dinamika perdagangan global khususnya kebijakan proteksionisme yang diberlakukan oleh negara-negara mitra dagang. Dalam kerangka kebijakan pembangunan industri nasional, Hilirisasi merupakan strategi penting dalam pembangunan industri nasional karena mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai lebih tinggi. Strategi ini tidak hanya memperkuat kapasitas produksi dalam negeri, tetapi juga mendorong efisiensi ekonomi dan menjadikan produk Indonesia lebih kompetitif di pasar domestik maupun internasional (Matondang, *et. al*, 2024).

Selanjutnya, komoditi pakaian jadi juga mulai merambah pasar dalam negeri yang mengancam produk dalam negeri dengan harga yang murah dan kualitas yang lebih baik. Pemerintah mengatur kebijakan impor dengan menambah syarat perizinan berupa pertimbangan teknis yang bertujuan melindungi pasar domestik, namun berdampak pada terhambatnya kegiatan ekonomi terutama rantai pasokan dan industri manufaktur. Kebijakan ini menyebabkan penumpukan kontainer di pelabuhan karena belum mendapatkan Persetujuan Impor (PI) atau pertimbangan teknis sehingga pemerintah merespon dengan menerbitkan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang berisi relaksasi perizinan impor untuk mengatasi hambatan perizinan dan

penumpukan kontainer. Dalam sektor pakaian jadi, peraturan ini menghapus persyaratan persetujuan teknis dan menggantinya dengan verifikasi teknis dan dokumen pabean berupa *manifest*. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan verifikasi dan mengurangi waktu serta biaya impor, namun berdampak pada naiknya volume impor serta penurunan kualitas produk domestik. Meskipun demikian, impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) tetap harus memenuhi ketentuan pertimbangan teknis (Wulandari dan Adah, 2024).

Dari sisi ekspor menurut Rashika dan Oktafia (2024), CPO di pasar internasional dan kebijakan tarif atau non-tarif memiliki dampak positif yang signifikan terhadap jumlah ekspor ke India dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini menunjukkan bahwa jika harga internasional meningkat dan kebijakan perdagangan semakin mendukung, jumlah ekspor CPO ke India juga akan meningkat.

4.5. Tantangan Pemerintah dalam mengatur Ekspor dan Impor di Sektor Agrikultur dan Manufaktur

Kegiatan ekspor-impor selama ini sudah sejalan dengan yang pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun di sektor agrikultur dan manufaktur masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, dari sisi ekspor, yaitu:

1. **Standar dan regulasi negara tujuan**, sering kali produk dalam negeri kalah bersaing dipasar internasional dikarenakan banyak negara tujuan memperlakukan *SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures)* yang ketat, seperti bebas hama, standar organik, dan keamanan pangan)
2. **Akses pasar luar negeri terbatas**, produk manufaktur Indonesia terkadang menghadapi **tarif tinggi atau hambatan non-tarif**, seperti sertifikasi teknis dan SNI asing;

3. **Isu lingkungan dan keberlanjutan**, misalnya produk sawit yang menghadapi kampanye negatif karena dianggap meruak lingkungan dan tidak ramah iklim;
4. **Keterbatasan inovasi dan teknologi**, pengembangan teknologi inovatif, peningkatan infrastruktur pertanian seperti irigasi, serta kebijakan subsidi yang tepat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan produksi. Langkah strategis jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan produktivitas lokal dan inovasi teknologi mutakhir juga diperlukan.

Sementara itu dari sisi impor tantangan yang dihadapi pemerintah, yaitu:

1. **Ketergantungan terhadap pangan impor**, tingginya impor terhadap komoditi penting seperti: gandum, kedelai, jagung, dan bawang putih menyebabkan terganggunya ketahanan pangan dan ketergantungan;
2. **Persaingan harga dengan produk impor**, produsen lokal justru sering kali dirugikan karena harga gabah di tingkat produsen turun akibat masuknya beras impor dalam jumlah besar, terutama saat bertepatan dengan musim panen. Hal ini dapat memengaruhi pendapatan petani, menurunkan insentif untuk menanam padi, dan dalam jangka panjang dapat memperlemah keberlanjutan sektor pertanian nasional (Rizki dan Pangesti, 2025);
3. **Keseimbangan neraca perdagangan**, jika kegiatan impor terjadi lebih banyak daripada ekspor hal ini akan menekan neraca perdagangan dan devisa negara;
4. **Fluktuasi harga dan kurs**, harga komoditas yang diperjualbelikan baik ekspor maupun impor sangat dipengaruhi oleh harga pasar global dan nilai tukar.

4.6. Strategi Pemerintah dalam mengatur Ekspor dan Impor di Sektor Agrikultur dan Manufaktur

Adapun strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatur ekspor-impor di sektor agrikultur dan manufaktur adalah sebagai berikut:

1. **Perlindungan pasar domestik**, dilakukan pemerintah dengan melakukan kebijakan tarif, kuota, dan standar teknis agar produsen dalam negeri dapat terlindungi dari barang impor. Sementara konsumen dapat memilih barang yang berkualitas baik yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri.
2. **Dorongan nilai tambah dan daya saing**, dengan adanya nilai tambah produk, peningkatan kualitas produk, promosi ekspor, kerja sama dagang akan menghasilkan keuntungan yang lebih bagi produsen, serta dapat meningkatkan daya saing ekspor produk lokal;
3. **Perluasan akses pasar global**, dengan melakukan kerja sama dagang internasional, seperti perjanjian FTA/ CEPA dengan Australia, Korea, dan Uni Emirat Arab;
4. **Penguatan sektor hulu-hilir nasional**, mendorong ekspor barang olahan seperti sawit menjadi biodiesel, kakao menjadi coklat.

5. KESIMPULAN

Perdagangan internasional merupakan pertukaran barang, jasa, dan faktor produksi yang melintasi batas negara. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sementara itu, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dari luar negeri ke dalam negeri (Indonesia). Dalam kegiatan ekspor impor pemerintah memiliki peranan yang

penting dalam menetapkan kebijakan. Pemerintah menetapkan bea masuk yang merupakan pungutan negara berdasarkan UU yang dikenakan terhadap barang impor. Peran kebijakan pemerintah dalam ekspor dan impor pada sektor agrikultur dan manufaktur.

Namun terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah dari sisi ekspor, yaitu: (1) Standar dan regulasi negara tujuan, (2) Akses pasar luar negeri terbatas, (3) Isu lingkungan dan keberlanjutan, dan (4) Keterbatasan inovasi dan teknologi. Sementara itu dari sisi impor, adalah (1) Ketergantungan terhadap pangan impor, (2) Persaingan harga dengan produk impor, (3) Keseimbangan neraca perdagangan, dan (4) Fluktuasi harga dan kurs.

Kegiatan ekspor-impor sangat penting bagi perekonomian Indonesia sehingga pemerintah harus berupaya untuk mengatur kegiatan tersebut agar berjalan dengan lancar, seperti dengan perlindungan pasar domestik, dorongan nilai tambah dan daya saing, perluasan akses pasar global, dan penguatan sektor hulu-hilir nasional. Hal ini dilakukan untuk membantu produsen dan konsumen dalam negeri tidak kalah bersaing dari global dan dapat menyeimbangkan neraca perdagangan dan meningkatkan pendapatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rasyid, D. B., Pratama, M. J. P., al Hapiz, M. Y., & Handayani, S. (2025). Analisis Efektivitas Langkah-Langkah Indonesia dalam Menghadapi Kebijakan Kenaikan Tarif Resiprokal Amerika Serikat Oleh Presiden Donald Trump. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(4), 137–149.
<https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie>
- Arfiani, I. S. (2019). Analisis Empiris Hubungan antara Ekspor, Impor,

- Nilai Tukar dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 81–98.
<https://doi.org/10.29259/jep.v17i2.9485>
- Azizah, I. N. N., Syaikat, Y., & Hidayat, N. K. (2024). Dampak Impor Input Kapas dan Tenaga Kerja terhadap Daya Saing Pakaian Jadi Indonesia di Negara Tujuan Utama. *Agro Bali : Agricultural Journal*, 7(1), 246–255.
<https://doi.org/10.37637/ab.v7i1.1503>
- Baharuddin, N. (2022). Dampak Perubahan Tarif Impor Negara Intra ASEAN terhadap Pasar Jagung Indonesia. *Bata Ilyas Educational Management Review*, 2(2), 45–57.
- Baladiah, R. S. P., & Silviana, A. (2023). Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 900–909.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.2905>
- Bayu, A. (2024). Dampak Penetapan Tarif Impor Kedelai di Indonesia dengan Analisis Keseimbangan Parsial. *Cendekia Niaga : Journal of Trade Development and Studies*, 8(2), 159–168.
- Biruloma Lagaida, B., & Novianti, T. (2022). Kebijakan Perdagangan Impor Bahan Baku Industri Makanan dan Minuman. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 10(2), 809–822.
- Hutabarat, F. br, Matondang, K. A., Sembiring, M., Handani, T., & Manalu, R. B. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Kuota Impor Terhadap Harga Komoditas di Pasar Indonesia. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 295–302.
- Inti, R. W., & Rozci, F. (2023). Analisis Dampak Penerapan Kebijakan Tarif Bea Masuk Terhadap Impor Gula di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis*, 11(1), 40–47.
- Izzaty, K. M., & Oktora, S. I. (2025). Analisis Dampak Kebijakan Tarif Safeguard terhadap Impor Kain Tenun dari Kapas di Indonesia Tahun 2008-2022 dengan Pendekatan ARIMA Intervention Model. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 7(2), 163–176.
<https://doi.org/10.13057/ijas.v7i2.85689>
- Kurniawan, F. A. A., Ramadhani, I., & Fitrie, R. A. (2024). Analisis Pengambilan Keputusan Kebijakan Impor Beras dalam Konteks Pemenuhan Pangan Nasional di Indonesia. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(2), 1–15.
<https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2394>
- Kusumastuti, A. I., Indriani, S. A., & Febriyyani, T. (2024). Dampak Maraknya Impor Beras di Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir terhadap Kesejahteraan Petani Padi. *JINTAN : Jurnal Ilmiah Pertanian Nasional*, 4(1), 78–88.
<https://doi.org/10.30737/jintan.v4i1.5312>
- Lesmana, A. (2022). Masalah Keagenan dalam Kebijakan Impor Garam di Indonesia. *Jurnal Syntax*

- Admiration*, 3(10), 1290–1299.
<https://doi.org/10.46799/jsa.v3i10.364>
- Matondang, K. A., Handayani, A., Hasibuan, A. P., Simanungkalit, J., & Rina. (2024). Strategi Hilirisasi di Indonesia dalam Menghadapi Kebijakan Proteksionisme pada Komoditas Baja/Besi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5), 3371–3377.
<https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24339>
- Mizanul Amal, A. A., Faiz, A., Bintara, M. A., & Sari, R. N. (2024). Peran Sukuk dalam Stabilitas Moneter di Indonesia. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(4), 347–359.
<https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i4.1447>
- Nugraha, Y. P. E. A., Mau, H. A., & Candra, M. (2025). Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Kain Impor. *JIRK: Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(10), 7393–7406.
- Nurchahyo, M. A., & Nugroho, A. S. (2023). Dampak Implementasi Kebijakan Pembatasan Impor Sepeda pada Pola Perdagangan Internasional. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 7(1), 55–75.
- Pamungkass, B. A., De Fretes, C. H. J., & Hergianasari, P. (2023). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Impor Beras Tahun 2021. *Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 7(2).
<http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus>
- Putra, L. A. D., & Saad, Z. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Larangan Ekspor terhadap Profitabilitas Perusahaan Sub Sektor Kelapa Sawit di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen*, 3.
- Putri, D., Sari, L. E., & Salsabilla, R. (2024). Peran Ekspor dan Impor Terhadap Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 74-85.
<https://doi.org/10.56184/jeijournal.v2i2.409>
- Putri, N. P. A. M., & Karmini, N. L. (2023). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Volume Impor Gandum di Indonesia. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 5(1), 301–312.
<https://doi.org/10.55606/sinov.v5i1.588>
- Rashika, M., & Oktafia, R. (2024). Analysis of the Influence of International Prices, Exchange Rates, Export-Import Quotas, Tariff and Non-Tariff Policies on the Volume of Indonesian Palm Oil (CPO) Exports to India. *IJEBIR*, 03(05), 904–919.
- Riyanto, F., Sitohang, A. C., Kusumadewi, N. M. A., Sari, F. A. Y., Dinarti, R. P., Rokmah, D. O., & Marcal, I. A. F. (2024). Kelebihan dan Kekurangan Impor Barang Asing bagi Negara Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), 838–845.

- <https://doi.org/10.46306/jbbe.v18i1>
- Rizki, A., & Pangesti, C. N. (2025). Analisis Pengaruh Kebijakan Impor Beras terhadap Permintaan Dalam Negeri. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 73–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v3i2.3786>
- SEKI: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. (20). Diakses pada 10 Juni 2025, <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/seki/Default.aspx#headingOne>
- Septiana, B., Kusnadi, N., & Fariyanti, A. (2022). Daya Saing Bawang Putih di Indonesia. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 10(1), 40–52. <https://doi.org/10.29244/jai.2022.10.1.40-52>
- Tinjauan Umum Sinergi untuk Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional. (2024). Diakses pada 11 Juni 2025, https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LPI%202024_02_TU.pdf
- Wulandari, D., & Mas'adah. (2024). Implementasi Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Impor Pakaian Jadi terhadap Produk Lokal (Studi Permendag Nomor 8 Tahun 2024). *Jurnal Ekono Insentif*, 18(2), 83–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.36787/jei.v18i2.1759>